

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Tamiang

Ariska Miranda¹, Yani Rizal², Martahadi Mardhani^{3*}

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi, Universitas Samudra

³Email: martahadi@unsam.ac.id

Abstracts

This study aims to determine the effect of regional original income and general allocation funds on regional spending in Aceh Tamiang district. This study uses time series data and was obtained from the Central Bureau of Statistics (BPS) of Aceh Tamiang Regency with the 2007-2021 time series. This research model uses multiple linear regression methods using the evIEWS application. The results of this study indicate that partially Own-Owned Revenue has a positive and significant effect on Regional Expenditure in Aceh Tamiang District, partially General Allocation Fund has a positive and significant effect on Regional Expenditure in Aceh Tamiang District, and simultaneously Regional Original Revenue and General Allocation Fund have an effect positive and significant towards Regional Expenditures in Aceh Tamiang District. The result of the coefficient of determination (R²) is 0.7495 or 74.95% and the remaining 25.05% is influenced by other variables outside this study.

Keywords: regional original income, general allocation funds, regional spending

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian ini menggunakan data time series dan diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Tamiang dengan runtun waktu 2007-2021. Model penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda dengan menggunakan aplikasi evIEWS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Tamiang, secara parsial Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Tamiang, dan secara Simultan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Tamiang. Hasil koefisien determinasi (R²) sebesar 0.7495 atau 74,95% dan sisanya 25,05% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Keywords: pendapatan asli daerah, dana alokasi umum,, belanja daerah.

PENDAHULUAN

Berlakunya (undang- undang no.25 tahun 1999) tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, membawa perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintahan daerah. UU ini menegaskan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemda (Pemerintah Daerah), Pempus (Pemerintah Pusat) akan mentransferkan dana perimbangan kepada Pemda. Dana Perimbangan tersebut terdiri dari DAU (Dana Alokasi Umum), Dana

Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari bagi hasil pajak pusat. Di samping dana perimbangan tersebut, Pemda juga memiliki sumber pendanaan sendiri berupa PAD, pinjaman daerah, maupun lain-lain penerimaan daerah yang sah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemda.

Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar-pemerintahan dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum diseluruh daerah (Sidik, Machfud, B. Raksaka Mahi, Robert Simanjuntak, 2002) . Adanya transfer dana ini bagi Pemda merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan kewenangannya, sedangkan kekurangan pendanaan diharapkan dapat digali melalui sumber pendanaan sendiri. Namun, kenyataannya, transfer dari Pempus merupakan sumber dana utama Pemda untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari atau belanja daerah, yang oleh Pemda dilaporkan di perhitungan APBD.

Beberapa ahli telah berpendapat mengenai belanja daerah. Menurut (Halim, 2007) , belanja daerah merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintahan di atasnya. Sementara itu, (Erlina, 2012) berpendapat bahwa belanja daerah adalah suatu rencana keuangan yang disusun untuk satu periode mendatang yang berisi tentang pengeluaran yang menggambarkan strategi pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk pembangunan daerah yang juga berfungsi sebagai alat pengendalian dan instrument politik.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pendapatan Asli Daerah

(Halim, 2004) “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. Undang-Undang No.28 Tahun 2009 juga menyebutkan tentang pengertian pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. (Bahihagi, 2011) mengatakan “Pendapatan daerah adalah peningkatan pendapatan yang berasal dari berbagai sektor pendapatan daerah.

Menurut (UU Nomor 33 Tahun 2004.), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat.

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBN yang dialokasikan Kepada Pemerintah

Daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004)

Dana Alokasi Umum yang berasal dari pemerintah pusat merupakan dana yang dialokasikan untuk tujuan pembiayaan pengeluaran dan kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Hal ini berarti terjadi transfer dari pemerintah pusat kepada daerah, dan pemerintah daerah dapat menggunakan dana ini guna untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat sehingga meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan standar kehidupan masyarakat, dan menciptakan hidup yang sehat dan harapan hidup yang lebih panjang (Harahap, 2010)

Belanja Daerah

menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Nomor 21 Tahun 2011) tentang, “Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. Istilah belanja terdapat dalam laporan realisasi anggaran, karena dalam penyusunan laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas. Menurut Undang-Undang No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, “Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”.

Kesimpulannya belanja daerah merupakan biaya atau belanja daerah merupakan penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar, atau deplasi aset, atau terjadinya hutang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada para peserta ekuitas dana.

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang di peroleh dari Badan Pusat Statistika (BPS) Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2007 – 2021. Untuk analisis data diperlukan suatu cara atau metode analisa data. Metode analisa data digunakan untuk mengubah atau menganalisa data hasil penelitian agar dapat diinterpretasikan sehingga laporan yang dihasilkan mudah untuk dipahami. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda. Persamaan estimasi regresi linier berganda yaitu sebagai berikut (Sugiyono,2016):

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n + e$$

Kemudian rumus di modifikasi menjadi:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dimana:

Y	= Belanja Daerah
X ₁	= Pendapatan Asli Daerah
X ₂	= Dana Alokasi Umum
β ₀	= Konstanta
β ₁	= Koefisien regresi faktor X ₁
β ₂	= Koefisien regresi faktor X ₂
e	= error term

HASIL DAN PEMBAHASAN

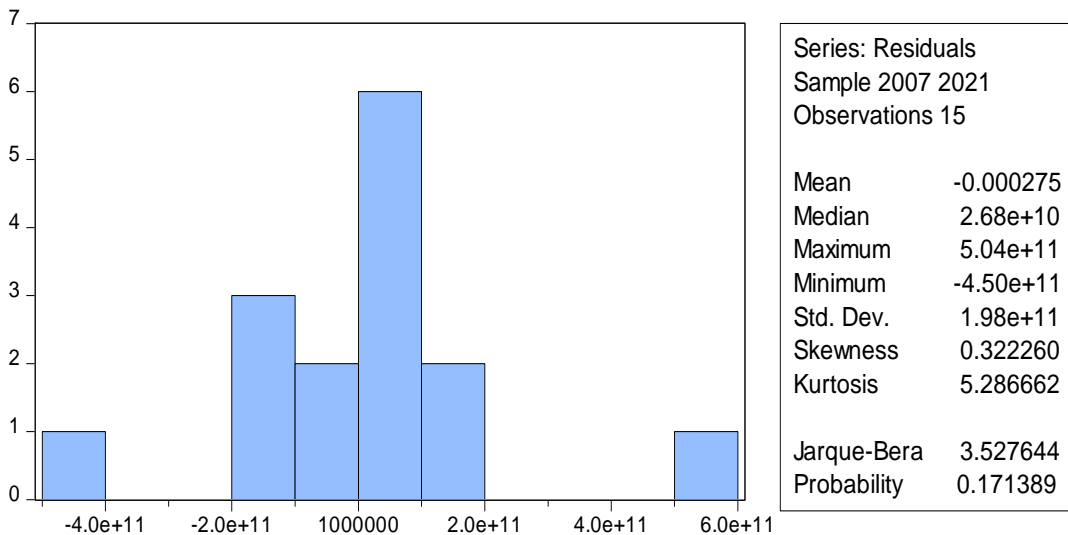
Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi normalitas data dilakukan dengan pengujian Jarque Bera. Dalam uji ini, pedoman yang digunakan dalam pengambilan keputusan adalah (Ghozali, 2016):

- a. Jika nilai J-Bhitung > 0.05 maka distribusi normal, dan
- b. Jika nilai J-Bhitung < 0.05 maka distribusi tidak normal.

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas



Sumber : Data Diolah 2022

Berdasarkan tabel 1 diatas hasil uji normalitas residual adalah : nilai *jarque-Bera* sebesar 3,527644 dengan *probability* sebesar 0,171389 dimana > 0,05, hal ini berarti bahwa residual data yang digunakan adalah berdistribusi normal dan layak digunakan untuk memprediksi.

Uji Multikolinearitas

pada pengujian multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent atau variable bebas. Untuk menemukan terdapat atau tidaknya multikolinearitas pada model regresi dapat diketahui dari nilai toleransi dan nilai variance inflation factor (VIF). Nilai Tolerance mengukur variabilitas dari variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai toleransi rendah sama dengan nilai VIF tinggi, dikarenakan $VIF = 1/tolerance$, dan menunjukkan terdapat kolinearitas yang tinggi. Nilai cut off yang digunakan adalah untuk nilai tolerance 0,10 atau nilai VIF diatas angka 10 (Ghozali, 2016)

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	2.76E+22	9.026344	NA
X1	2.002099	5.269707	1.723790
X2	0.303106	15.14434	1.723790

Sumber : Data Diolah 2022

Berdasarkan tabel 2 diatas uji multikolinearitas di atas menunjukkan bahwa nilai Cotered VIF untuk Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum yaitu < 10, maka dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model tersebut.

Uji Heteroskedasticity

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Konsekuensinya adanya heteroskedastisitas dalam model regresi adalah penaksir yang diperoleh tidak efisien, baik dalam sampel kecil maupun besar. Untuk menguji model apakah terdapat Heteroskedastisitas dapat menggunakan uji Harvey. Uji harvey dilakukan dengan melihat nilai Obs*R-squared. Data tidak terkena heteroskedastisitas apabila Obs*R-squared atau probabilitas Chi-Square > alpha ($\alpha = 0,05$) (Ghozali, 2016)

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedasticity

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey			
F-statistic	19.52137	Prob. F(2,12)	0.0002
Obs*R-squared	11.47354	Prob. Chi-Square(2)	0.0032
Scaled explained SS	15.73863	Prob. Chi-Square(2)	0.0004

Sumber : Data Diolah 2022

Berdasarkan tabel 3 diatas hasil uji Heteroskedasticity di atas nilai Prob. Chi-square pada Obs*R-squared yaitu sebesar 0,0032 < 0,05 artinya model regresi tidak bersifat homoskedastisitas atau dengan kata lain tidak ada masalah asumsi non heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

autokorelasi dapat muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu yang berkaitan satu sama lainnya. Untuk mendeteksi terdapat atau tidaknya autokorelasi adalah dengan melakukan uji Run Test. Run test merupakan bagian dari statistik non-parametik yang dapat digunakan untuk melakukan pengujian, apakah antar residual terjadi korelasi yang tinggi. Apabila antar residual tidak terdapat hubungan korelasi, dapat dikatakan bahwa residual adalah random atau acak (Ghozali, 2016)

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
F-statistic	0.298426	Prob. F(1,10)	0.5968
Obs*R-squared	0.405690	Prob. Chi-Square(1)	0.5242

Sumber: Data Diolah 2022

Berdasarkan tabel 4 diatas hasil Uji Autokorelasi pada nilai Prob Chi-Square(1) yang artinya merupakan nilai p value uji *Breusch-Godfrey Serial Correlation Lm*, yaitu sebesar $0,5242 > 0,05$ artinya residual tidak ada masalah autokorelasi.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dan diolah dengan menggunakan *Software Eviews 10* dapat dilihat hasil dalam tabel 5. dibawah ini:

Tabel 5. Hasil Regresi Linier Berganda

Variable	Coefficient	Prob.
C	3.46E+10	0.8385
PAD	3.680821	0.0232
DAU	1.335659	0.0320
R-squared	0.749528	
Adjusted R- squared	0.707782	
Prob (F-statistik)	0.000247	

Sumber : Data Diolah 2022

Pada tabel 5 Menunjukkan hasil regresi koefisien-koefisien analisis berganda Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Tamiang.

$$Y = 34.600.000.000 + 3,680821X_1 + 1,335659X_2$$

Dari persamaan berikut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Nilai konstanta sebesar 34.600.000.000 menunjukkan bahwa jika pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum tetap maka Belanja Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebesar 34.600.000.000.
- Nilai koefisien Pendapatan Asli Daerah sebesar 3,680821 menunjukkan bahwa apabila terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar 1 rupiah, maka Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Tamiang akan meningkat sebesar 3,680821 rupiah. Sebaliknya jika terjadi penurunan Pendapatan Asli Daerah sebesar 1 rupiah, maka Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Tamiang akan menurun sebesar 3,680821 rupiah dalam satu tahun, dengan asumsi *ceteris paribus*.
- Nilai koefisien Dana Alokasi Umum sebesar 1,335659 menunjukkan bahwa apabila terjadi peningkatan Dana Alokasi Umum sebesar 1 rupiah, maka Belanja Daerah Kabupaten Aceh Tamiang akan meningkat sebesar 1,335659 rupiah. Sebaliknya jika terjadi penurunan Dana Alokasi Umum sebesar 1 rupiah, maka Belanja Daerah di Kabupaten Aceh tamiang akan menurun sebesar 1,335659 rupiah dalam satu tahun, dengan asumsi *ceteris paribus*.

Pembuktian Hipotesis

Uji t (Uji Parsial)

Berdasarkan tabel 5. diatas maka diperoleh hasil estimasi sebagai berikut: Hasil estimasi koefisien variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 3,680821 dan signifikan pada prob. $0,0232 < \alpha = 0,05$. Artinya secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Tamiang. Sehingga hipotesis ke-1 diterima. Hasil estimasi koefisien variabel Dana Alokasi Umum sebesar 1,335659 dan signifikan pada prob. $0,0320 < \alpha = 0,05$. Artinya secara parsial Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Tamiang. Sehingga hipotesis ke-2 diterima.

Uji F (Uji Simultan)

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa nilai prob (F-Statistik) sebesar $0,000247 < \alpha = 0,05$. Artinya secara simultan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Tamiang. Sehingga hipotesis ke-4 diterima.

Koefisien Determinasi

Berdasarkan tabel 5. diatas nilai *R-squared* yang diperoleh sebesar 0.7495 atau 74,95% yang menunjukkan kemampuan variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Tamiang sebesar 74,95%, sedangkan sisanya 25,05% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Tamiang

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Tamiang dengan koefisien regresi variabel dan Pendapatan Asli Daerah sebesar 3,680821 dan nilai signifikansi sebesar 0.0232. Hal ini berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Tamiang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Iqbal, 2020), (Ernayani, 2017), (Nur, 2017) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Tamiang

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Tamiang dengan koefisien regresi variabel dan Dana Alokasi Umum sebesar 1,335659 dan nilai signifikansi sebesar 0.0320. Hal ini berarti bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Tamiang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Iqbal, 2020), (Ernayani, 2017), (Nur, 2017) bahwa variabel Dana Alokasi Umum mempunyai hubungan yang signifikan terhadap Belanja Daerah.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Tamiang, baik secara parsial dan simultan.

REFERENSI

- Bahihahi. (2011). Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu. *Jurnal Akuntansi*.
- Erlina. (2012). *Pengelolaan dan Akuntansi Keuangan Daerah*. USU Press.
- Ernayani, R. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah. 1, 43–52.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23*.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*.
- Harahap, R. U. (2010). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Utara. Universitas Sumatera Utara.
- Iqbal, M. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 3, 1–15.
- Nomor, U.-U. R. I. (2004). *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Nur, M. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah di Sulawesi Selatan. 5, 78–88.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang. Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih..
- Sidik, Machfud, B. Raksaka Mahi, Robert Simanjuntak, B. B. (2002). *Dana Alokasi Umum – Konsep, Hambatan dan prospek di Era Otonomi Daerah*
- Undang-Undang No. 25 Tahun 1999. *Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang No. 58 Tahun 2005. *Pengelolaan Keuangan Daerah*.